TUGAS MATA KULIAH
FILSAFAT PANCASILA
DAMPAK PEMERATAAN HARGA BBM BAGI SELURUH WARGA INDONESIA DI
SOROT DARI PANCASILA

Dosen Pengampu : Dr. A. W. Dewantara. S. S. M. Hum.

Disusun Oleh :

Wiwik Rohmawati

Nim 4305019045

UNIOVERSITAS KHATOLIK WIDYA MANDALA

FAKULTAS MIPA

PROGRAM STUDI DIII FARMASI

2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
Abstrak.....	2
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
BAB II.....	2
PEMBAHASAN.....	2
BAB III.....	2
INFORMASI BAHAN BAKAR MINYAK.....	2
1. JANUARI 2015.....	2
2. NOVEMBER 2014.....	2
3. DESEMBER 2008.....	2
4. OKTOBER 2005.....	2
5. MARET 2005.....	2
BAB IV.....	2
Bangun Market BBM Dalam Negeri, Indonesia Bisa Punya MOFI.....	2
PENUTUP.....	2
I. Kesimpulan.....	2
II. Saran.....	2
DAFTAR PUSTAKA.....	2
A. SUMBER MATERI.....	2

Abstrak

Pada usia 70 tahun, Indonesia merdeka, sebagai pemerintahan demokrasi yang segala sesuatu bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat maka di usia 70 tahun ini bangsa Indonesia memberikan suatu hadiah istimewa yang belum pernah di berikan oleh pemimpin sebelumnya, hadiah ini merupakan suatu keputusan yang di buat oleh pemerintah yakni di bidang persamaan harga bahan minyak.

Pemerintah membuat kesepakatan satu harga untuk bahan bakar minyak Indonesia ini, di harapkan kehidupan social dan perekonomian warga Indonesia menjadi lebih baik dan meningkat khususnya wilayah Papua yang masih memiliki akses jalur yang sangat sulit di jangkau, semoga dengan adanya kenijakan satu harga bahan bakar minyak mampu meningkatkan infrastruktur di wilayah Papua dan lainnya.

Kata kunci :

Bahan bakar minyak, satu harga, pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kebutuhan pokok dan sangat penting bagi para pengguna kendaraan. Dengan adanya bahan bakar para pengguna kendaraan mereka dapat menggunakannya sebagai bahan bakar alat transportasi. Beberapa tahun yang lalu di Indonesia BBM yang digunakan untuk kendaraan pada umumnya biasanya adalah bensin dan solar. Pada saat itu bensin mulai langka maka terbitlah bahan bakar baru untuk kendaraan yaitu pertalite dan pertamax. Setelah adanya penggantian maka untuk sementara waktu itu bensin tidak tersedia.

Pada saat munculnya pertamax dan pertalite pastinya menimbulkan pro dan kontra bagi warga masyarakat. Banyak sisi politiknya dari munculnya bahan bakar baru ini karena mampu merawat mesin secara baik dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Tujuan diterbitkan bahan bakar baru ini semata-mata agar tetap terjaga kelangsungan transportasi di Indonesia.

Dalam pemerintahan Indonesia sekarang telah dibuat harga BBM sama rata dari Sabang sampai Merauke, hal ini ada segelintir orang yang menyetujui, ada pula sebenarnya yang menolak, dikarenakan oleh suatu hal, namun apakah daya keputusan hanya ditangan presiden? Tingkat pendapatan suatu warga masyarakat tiap wilayah berbeda, akan tetapi harga BBM dibuat secara merata. Mungkin bagi warga yang mendapat gaji diatas UMR yang besar maka mungkin mereka tidak keberatan dalam pembelian dengan harga BBM dan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya, namun bagaimana dengan rakyat kecil? Saya sebagai warga, terutama Jawa Timur khususnya, dan saya hidup di Magetan dengan UMK yang sangat minim dibandingkan dengan kota lain saya harus membeli BBM dengan harga sekian. Namun apakah daya saya juga membutuhkan BBM untuk kelangsungan saya untuk bertransaksi.

BAB II

PEMBAHASAN

Kita sebagai generasi muda bangsa ini hendaknya kita lebih bijak dalam menyikapi beberapa permasalahan dalam pemerataan harga Bahan Bakar Minyak tersebut. Presiden Indonesia saat ini yaitu Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengesahkan sebuah kebijakan baru tentang satu harga Bahan Bakar Minyak karena diharapkan harga bahan bakar minyak di Papua dan Jawa terpaut harga yang sangat jauh. Diharapkan kepada masyarakat untuk berpartisipasi mewujudkan satu harga BBM tersebut. Presiden telah menegaskan kebijakan BBM satu harga antara Papua dan Jawa adalah suatu wujud untuk mensejahterakan kedadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tentu saja dalam pemerataan harga ini menimbulkan pro dan kontra, diantaranya:

1. Jokowi akui bahwa Pertamina bakal merugi

Keputusan Jokowi untuk membuat satu harga antara Papua dengan daerah lain akan merugikan pihak PT. Pertamina. dikarenakan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menyalurkan BBM tersebut karena wilayah Papua yang masih sulit dijangkau dan diakses oleh layanan – layanan transportasi umum.

2. Harga-harga di Indonesia Timur turun

Menurut Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), kebijakan BBM satu harga ini akan berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan pokok. Seperti halnya dengan harga pangan yang menurun disebabkan oleh harga bahan bakar pun menurun.

3. Kerugian Pertamina tak sebanding dengan pendapatannya.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa keputusannya untuk membuat satu harga bahan bakar minyak di Indonesia sesungguhnya tidak begitu fatal. Karena biaya logistic yang digunakan untuk pengiriman ke Papua sebenarnya sangat minim prosentase kerugiannya hanya 800 milyar atau hanya dari prosentase 2% saja.

4. Kebijakan ini berpotensi naikan harga BBM

Menurut direktur institute for essential service reform (IESR). Potensi masyarakat Indonesia dalam menyikapi satu harga BBM di Indonesia adalah ikut nombok. Dikarenakan adanya kemungkinan pembekaan dana sebesar USD 800 milyar.

5. Baru terjadi setelah 70 tahun RI merdeka

Menurut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku sangat senang dengan adanya keseragaman satu harga Bahan Bakar Minyak dari Aceh sampai Papua. Kebijakan ini menjadi sebuah lompatan karena dilakukan tanpa menggunakan dana APBN. Selain itu program ini telah terjadi setelah 70 tahun. Ini merupakan suatu hadiah yang baik khususnya bagi warga Papua dan Kalimantan harga bahan bakar sama dengan wilayah lain.

Bagi suatu wilayah yang karyawannya memiliki gaji UMR yang tinggi mereka akan mudah dalam mencukupi kebutuhannya dalam membeli bahan bakar minyak. Seharusnya jika harga bahan bakar minyak dijadikan satu harga maka mestinya pemerintah juga akan membuat UMR perwilayah sama. Dengan adanya demikian maka tidak ada kesenjangan social baik dari warga. Kalangan menengah atas maupun kalangan menengah kebawah.

Hal ini Pancasila juga berpengaruh dalam keputusannya satu harga ini. Pancasila yang berbunyi;

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Disini Pancasila yang terdapat dalam sila ke -2 dan ke-5 perlu diketahui pada sila ke-2 bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Disini dimaksudkan bahwa kita sebagai manusia seharusnya memiliki jiwa kemanusiaan terhadap makhluk social lainnya. Dan sebagai warga Negara yang baik hendaknya kita memiliki adab (sopan santun dan tata karma) karena pancasila dibuat berdasarkan pandangan yang memiliki sopan santun (adab).

Pada .tanggal 24 nJuli 2015 telah diluncurkan bahan bakar baru yaitu pertalite. Pertalite merupakan bahan bakar yang gasoline memiliki yang memiliki angka oktan 90 dan kemasan dari pertalite itu sendiri berwarna hijau terang dan bahan bakar ini tepat digunakan oleh kendaraan kompresi. Bahan bakar pertalite ini memiliki angka oktan 90 dan kemasan dari pertalite itu sendiri berwarna hijau terang dan bahan bakar ini tepat digunakan oleh kendaraan

kompresi. Bahan bakar pertalite ini memiliki angka oktan yang lebih tinggi daripada bahan bakar premium biasa, sehingga bahan bakar ini lebih tepat digunakan untuk kendaraan bermesin bensin yang sangat banyak beredar di Indonesia. Dengan adanya tambahan additive. Bahan bakar pertalite ini mampu menempuh jarak lebih jauh dengan harga yang masih terjangkau.

Bahan bakar memang sangat penting bagi transportasi, namun disatu sisi bagi pihak yang tidak bertanggung jawab, bahan bakar minyak dapat di timbun untuk kepentingan dan meraih keuntungan pribadi. Hal itu merupakan sifat yang tidak baik dan tidak bijak. Selain itu penimbunan bahan bakar minyak merupakan pelanggaran dalam hal penimbunan termasuk dalam sila ke 5 karena tindakan tersebut hanya menguntungkan di beberapa pihak saja.

Sebagai cerminan konkret, untuk itu shietra dan partners merujuk keputusan Mahkamah Agung RI perkara pidana register Nomor 2637 k/PID.SUS/2015 tanggal 03 Februari 2016. Dimana dalam dakwaan kesatu, terdakwa di dakwa karena melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan perbuatan “menyalahkan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang di subsidi pemerintah”

Sebagaimana diatur dan di ancam tindak pidana pasal 55 Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat 11 ke- 1 KUHP.

BAB III

INFORMASI BAHAN BAKAR MINYAK

1. JANUARI 2015

Pada 1 Januari 2015, Presiden Joko Widodo resmi menghapus subsidi BBM untuk jenis Premium, dan untuk bahan bakar Solar, ditetapkan subsidi tetap sebesar Rp. 1.000. Harga BBM Premium dan Solar akan diumumkan oleh pemerintah setiap awal bulan. Perhitungan harga akan menggunakan rumus yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mengacu pada harga minyak dunia, kurs Rupiah terhadap Dolar AS, serta faktor inflasi. Untuk Januari 2015, harga Premium turun dari Rp. 8.500,- menjadi Rp. 7.600,- sedangkan solar dari Rp. 7.500,- menjadi Rp. 7.250,- per liter.

2. NOVEMBER 2014

Pada 17 November 2014, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM. Premium naik dari Rp. 6.500,- menjadi Rp 8.500,- sedangkan solar dari Rp. 5.500,- menjadi Rp. 7.500,- per liter. Menurut pemerintah, pengurangan subsidi BBM akan memberikan ruang fiskal hingga Rp. 100,- triliun. Menurut menteri keuangan Bambang Brodjonegoro, pemerintah akan memberikan kompensasi berupa bantuan langsung senilai Rp. 200.000,- per bulan yang akan disalurkan kepada 15,5 juta keluarga. Kenaikan ini terjadi beriringan dengan turunnya harga minyak dunia secara drastis sejak Juni 2014.

3. DESEMBER 2008

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2008, pemerintah menurunkan harga jual eceran BBM jenis bensin premium, minyak solar, dan minyak tanah. Peraturan Menteri ini juga menetapkan harga jual eceran BBM jenis tersebut akan dievaluasi setiap bulan dan menetapkan batas untuk bensin premium sebesar Rp. 6.000,- per liter dan minyak solar Rp. 5.500,- per liter. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, harga jual eceran bensin premium dan minyak solar kembali mengalami penurunan pada 15 Desember 2008 dan 15 Januari 2009.

4. OKTOBER 2005

Pada 1 Oktober 2005 pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak di Indonesia sebanyak 80%. Keputusan ini diharapkan dapat menekan pengeluaran pemerintah untuk subsidi tahun 2005 sebanyak Rp. 89,2 triliun dan menahan defisit negara Rp. 24,9,- triliun, atau sekitar 0,9% PDB negara.

Pemerintah mendapatkan tentangan karena sebelumnya telah menyatakan bahwa kenaikan Maret 2005 sebanyak 29% merupakan kenaikan harga bahan bakar terakhir tahun ini.

Kenaikan pada 1 Oktober ini sebagai berikut:

JENIS BAHAN BAKAR	HARGA LAMA	HARGA BARU	KENAIKAN
MINYAK TANAH	700	2.000	185,7%
PREMIUM	2.400	4.500	87,5 %
SOLAR	2.100	4.300	104,8%

5. MARET 2005

Kenaikan harga BBM pada 1 Maret sebagai berikut:

JENIS BAHAN BAKAR	HARGA LAMA	HARGA BARU	KENAIKAN
PREMIUM	1.810	2.400	32,5%
SOLAR	1.650	2.100	27%

BAB IV

Bangun Market BBM Dalam Negeri, Indonesia Bisa Punya MOFI

Sampai saat ini Indonesia masih Impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam kondisi nilai tukar rupiah yang sangat tinggi seperti sekarang, tentu memiliki dampak signifikan. Lantas bagaimana supaya Indonesia tidak lagi tergantung pada impor? Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan Indonesia sebagai pasar yang besar ada baiknya pasar minyak itu di bawa ke dalam negeri.

Seperti yang dikatakan kepala BPHMigas, pada hari Senin 21 September 2015 di Jakarta “Pedagang - pedagang seharusnya membawa minyak itu masuk ke Indonesia. Nanti ada perdagangan berjangka. Sehingga investor bisa membangun storage di Indonesia. Kenapa bangun storage, karena ada pedagang yang datang yang mau menitipkan minyaknya,”

Menurutnya, dengan adanya pasar minyak di dalam negeri tentunya akan ada index harga minyak Indonesia sebagai hub di Asean. Pada akhirnya Indonesia pun memiliki MOFI (Middle Oil Flat Indonesia).

Andy berkata “Indonesia harus seperti itu. Masa kita tergantung sama Singapura terus. Padahal kita pasar yang besar. Kalau kita mau menjadi leader didalam pasar minyak Indonesia, kita seharusnya membangun banyak storage. Sehingga pedagang akan banyak yang masuk ke Indonesia. Setelah itu kita mikir harus bangun kilang untuk men-supply para pedagang. Singapura juga seperti itu”

PENUTUP

I. Kesimpulan

Sebagai warga yang bijak, kita harus menerima kesepakatan di buatnya satu harga Bahan Bakar Minyak. Dari Aceh sampai Papua telah di berlakukan harga bahan bakar yang sama. Di harapkan semua masyarakat Indonesia kehidupannya lebih maju dan mendapatkan hak keadilannya warga yang sama di Indonesia.

II. Saran

Sebaiknya pihak pemerintahan juga mempertimbangkan UMR agar disamakan perwilayah jika berlaku harga Bahan Bakar Minyak disamakan per wilayah.

Pemerintah lebih mengontrol pengeluaran bahan bakar agar meminimalkan kelangkaan pada bahan bakar.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER UTAMA

Dewantara, W Agustinus, (2006), masyarakat Indonesia Ditinjau dari Paradigma Konflik Karl

Marx, dalam WIDYA WARTA No. 01 Th. XXIX/Jan 2006.

Fauzi, Achmad, (1983), Pancasila Ditinjau dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi

Filosofis, Malang : Lembaga Penerbit Universitas Brawijaya.

<https://www.cnbcindonesia.com>

<https://m.merdeka.com>

<https://id.wikipedia.org>

<https://www.bphmigas.go.id>

Dewantara, A. W. (2017). Alangkah hebatnya negara gotong royong: Indonesia dalam kacamata Soekarno. PT Kanisius.

Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia. CIVIS, 5(1/Januari).

Dewantara, W. A. (2017). filsafat Moral. Daerah Istimewa Yogyakarta: penerbit PT Kanisius. ISBN, 978, 979.